

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	<i>i</i>
Daftar Isi	<i>iii</i>
Daftar Singkatan	<i>vi</i>
Daftar Tabel	<i>viii</i>
Daftar Gambar	<i>ix</i>
Daftar Foto	<i>xi</i>
Daftar Bagan dan Skema	<i>xii</i>
 Bab 1. Pendahuluan	 1
1.1 Pemerintah Daerah Melawan Narasi Ruang Pemerintah Pusat Melalui Pemetaan Partisipatif	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Literature Review	9
1.6 Pendekatan Teori	14
1.6.1 Teritorialisasi Penguasaan Hutan	14
1.6.2 Pemetaan Partisipatif	18
1.7 Definisi Konsepsional	20
1.8 Definisi Operasional	21

1.9	Metode Penelitian	21
1.10	Jenis Penelitian	22
1.11	Lokasi Penelitian	23
1.12	Sumber Data	24
1.13	Teknik Pengumpulan Data	24
1.14	Teknik Analisis Data	25

Bab II. Sejarah Akumulasi Kapital dan Penguasaan Hutan

	di Taman Nasional Kutai	27
2.1	Sejarah Akumulasi Kapital di Taman Nasional Kutai	28
2.2	Sejarah Enclave di Taman Nasional Kutai	35
2.3	Sejarah Perkembangan Demografis Masyarakat dan Problem Inkonsistensi Kebijakan Negara	40
2.4	Meningkatnya Kontrol dan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Kebutuhan Atas Sumber Daya di Era Desentralisasi	54
	Catatan Penutup	60

Bab III. Upaya Masyarakat Merebut Akses dan Kontrol Sumber Daya

	Melalui Pemetaan Partisipatif	62
3.1	Hilangnya Ruang Hidup dan Marjinalisasi Masyarakat Kawasan Taman Nasional Kutai	62
3.2	Gerakan Organik Merebut Akses dan Kontrol Sumber Daya Melalui Pemetaan Partisipatif	69
3.3	Reaksi Kolektif Masyarakat Akibat Terhentinya APBD	77
	Catatan Penutup	81

Bab IV. Kooptasi Strategi Pemetaan Partisipatif oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Timur untuk Perluasan Wilayah	82
4.1 Penggunaan Wacana Kesejahteraan Sebagai Bagian Dari Strategi	
Teritorialisasi	83
4.2 Gerakan Rekayasa: Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator	
Pemetaan Partisipatif	91
Catatan Penutup	114

Bab V. Dampak Pemetaan Partisipatif oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Timur Terhadap Masyarakat dan Kawasan

Taman Nasional Kutai	115
5.1 Lahirnya Basis Penetapan Kawasan Taman Nasional Kutai	116
5.2 Meluasnya Perambahan	134
5.3 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik	145
5.4 Terbukanya Ruang Reklamasi yang Lebih Luas Melalui	
Skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	149
Catatan Penutup	154

Bab VI. Penutup

6.1 Temuan Empiris	155
6.2 Refleksi Teoretis	158
Daftar Pustaka	160